

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : FADILLAH AYU NINGRUM
NPM : 1505170135
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : FADILLAH AYU NINGRUM
N P M : 1505170135
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA.,SE.,M.Si

Penguji II

PUTRI KEMALA DEWI.,SE.,Ak.,M.Si

Pembimbing

H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN.,SE.,Ak.,MM.,CA

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : FADILLAH AYU NINGRUM
N.P.M : 1505170135
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

H. Syamsul Bahri Arifin.,SE.,Ak.,MM.,CA

**Diketahui/Disetujui
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Ayu Ningrum

NPM : 1505170135

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Fadillah Ayu Ningrum
1505170135

ABSTRAK

FADILLAH AYU NINGRUM. NPM.1505170135. ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO, 2019. Skripsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal pada PT. Cakra Buana Alkesindo. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. Perusahaan cukup mengoreksi pos – pos yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya – biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan Komersial, Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan Fiskal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafa'atnya di akhirat kelak, Aamiin ya Rabbal'alamin. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di dalam skripsi ini penulis mencoba untuk meneliti mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan pada PT. Cakra Buana Alkesindo. Penulis berharap proposal ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, yaitu yang sangat istimewa Orang Tua tercinta **Ayahanda Subagio** dan **Ibunda Yety Indrawaty** atas kasih sayang, do'a yang begitu tulus dan dukungan baik secara lahir dan batin. Serta untuk **Adik** saya **Muhammad Fauzan Maulana** yang telah memberikan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan proposal ini.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **H. Syamsul Bahri Arifin, SE., Ak., MM., CA** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu **Dini Fitri Anggraini** selaku Komisaris dari PT. Cakra Buana Alkesindo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Teman – teman seperjuangan **Raiesa Amin** dan **Adja Fitri Kamila Imani** yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabat terbaik **Juni Stepanny, Dili Lestari, Deasy Iras Panggabean, Widiya Ramadhani, Vivi Ariani, Nur Indah Maulidinna, Finny Sutristiani, Fitri Octaviana, Tengku Mazhura, Winda Afrianti**

Siregar serta seluruh teman – teman kelas **B Akuntansi Pagi** yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Semoga proposal ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, Januari 2019
Penulis

Fadillah Ayu Ningrum
1505170135

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Konsep Dasar Akuntansi.....	7
a. Definisi Akuntansi.....	7
b. Definisi Akuntansi Perpajakan.....	8
c. Definisi Laporan Keuangan.....	10
2. Konsep Dasar Perpajakan.....	12
a. Definisi Pajak.....	12
b. Penggolongan Pajak.....	15
c. Fungsi, Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak.....	16
d. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	20
e. Manajemen Pajak.....	21
f. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.....	22
3. Laporan Laba Rugi.....	22
a. Definisi Laba Rugi.....	22
b. Fungsi dan Tujuan Laporan Laba Rugi.....	24
c. Elemen Dalam Laporan Laba Rugi.....	25
4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	25
a. Definisi Laporan Keuangan Komersial.....	25
b. Definisi Laporan Keuangan Fiskal.....	26
c. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.....	27
5. Koreksi Fiskal.....	30

a. Definisi Koreksi Fiskal	30
b. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif	33
c. Contoh Kasus Koreksi Fiskal.....	35
6. Penelitian Terdahulu	41
B. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Definisi Operasional Variabel.....	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	
1. Laporan Keuangan	
PT. Cakra Buana Alkesindo	51
2. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi	
PT.Cakra Buana Alkesindo	53
B. Pembahasan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo	3
Tabel II.1 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal	28
Tabel II.2 Laporan Laba Rugi PT. ABC	35
Tabel II.3 Penyusutan Metode Garis Lurus	36
Tabel II.4 Rekonsiliasi Fiskal	37
Tabel II.5 Pengkreditan Pajak	39
Tabel II.6 Rekapitulasi Rekonsiliasi Fiskal	40
Tabel II.7 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel III.1 Jadwal Penelitian.....	47
Tabel IV.1 Neraca PT. Cakra Buana Alkesindo	51
Tabel IV.2 Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo	52
Tabel IV.3 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo	53
Tabel IV.4 Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Siklus Akuntansi.....	12
Gambar II.2 Kerangka Berfikir	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunannya. Sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu berasal dari pajak. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik pendapatan dari dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri.

Wajib Pajak Badan biasanya terdiri dari perusahaan – perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau CV. Perusahaan – perusahaan atau CV dalam prakteknya tentu melakukan proses pembukuan dan pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi. Keuangan seperti ini biasanya dibutuhkan oleh berbagai macam pihak terutama sekali adalah pemilik perusahaan. Laporan keuangan ini pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, menyediakan informasi menyangkut keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penyusunan laporan keuangan seperti ini diatur dalam bentuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi

kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Penggunaan standar ini terutama dimaksudkan agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa menjadi sarana mengkomunikasikan apa yang telah dilakukan manajemen perusahaan kepada pihak investor atau kreditur. Pihak lain yang sebenarnya berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan adalah pemerintah, karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan maka semakin besar pajak penghasilan yang bisa ditarik, begitu juga sebaliknya.

Saat melakukan koreksi fiskal biasanya ditemukan koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif merupakan penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat. Sedangkan koreksi negatif merupakan penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak.

Penyebab timbulnya atau terjadinya koreksi fiskal tersebut adalah karena perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan posisi – posisi dalam laporan laba rugi, seperti dalam pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya serta adanya perbedaan waktu pengakuan tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan / pencatatan antara akuntansi dan fiskal, misalnya penyusutan, amortisasi, persediaan, pencadangan dan sebagainya. Akibat perbedaan tersebut dapat

mengakibatkan semakin besar atau kecilnya laba fiskal (sering juga disebut Laba Kena Pajak) agar mengurangi jumlah apajak yang seharusnya dibayarkan. Menurut Suandy (2008) menyatakan bahwa, “Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial”.

PT. Cakra Buana Alkesindo merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk alat – alat kesehatan dan kepemilikan alat kesehatan.

Tabel I.1
Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo

PT. CAKRA BUANA ALKESINDO	
LABA RUGI	
periode 01 Jan - 31 Des 2017	
Pendapatan	2.159.682.050
Persediaan Awal	10.500.000
Pembelian	1.552.141.419
Persediaan Akhir	87.645.083
Harga Pokok Penjualan	1.474.996.336
Laba Kotor	684.685.714
Beban:	
Beban Pemasaran:	
By. Entertaint	40.025.347
By. CN	177.741.400
By. Infak	3.020.393
Total Beban Pemasaran	220.787.140
Beban Operasional:	
By. Gaji + Nthr	168.900.000
By. Kendaraan	4.918.500
By. Perdin	37.615.000
By. ATK	5.693.990
By. Listrik, PAM & Telkom	9.535.000
By. Perlengkapan Kantor	680.000

By. Lain – lain	8.186.000	
By. Umum & Admin	1.948.750	
By. Ongkir	15.668.800	
By. Rutin	97.721.000	
By. Fee	35.000.000	
Total Beban Operasional		385.867.040
Pendapatan Lain – lain		102.876
By. Diluar Usaha		2.498.990
Laba Bersih		75.635.420

Sumber: PT. Cakra Buana Alkesindo

Pada laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo terdapat pencatatan – pencatatan yang tidak pada posisi yang sebenarnya serta perusahaan juga tidak menghitung beban pajaknya. Adapun pencatatan yang tidak pada posisi yang sebenarnya yaitu, By. CN dan By. Fee yang merupakan biaya untuk keperluan pribadi perusahaan. By. Gaji dan THR dimana THR tersebut bukan berupa nominal melainkan sembako (barang). Pendapatan lain – lain yang merupakan pendapatan bunga. By. Diluar Usaha yang merupakan pembayaran denda.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut undang – undang pajak penghasilan yang berlaku, adanya beban – beban pajak yang tidak pada posisi yang sebenarnya dalam laporan laba rugi. Beban pajak inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan benar.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul, **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cakra Buana Alkesindo”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak menghitung beban pajak pada Laporan Laba Rugi.
2. Perusahaan mencantumkan beban – beban yang tidak diakui oleh fiskal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah, “Apakah koreksi fiskal atas Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah beban yang dikoreksi pada Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan akuntansi pajak, khususnya koreksi fiskal pada laporan laba rugi.
- c. Bagi Universitas atau pihak lain, penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Konsep Dasar Akuntansi

a. Definisi Akuntansi

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

Menurut Lubis (2017:63), definisi yang diberikan oleh *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA) pada tahun 1887 menyatakan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut.”

Adapun definisi yang diberikan oleh *Accounting Principles Board Statement No. 4* (1970) menyatakan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih antara beberapa alternatif.” (Lubis, 2017:63)

Dari dua definisi tersebut, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi keuangan

yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam ilmu akuntansi, terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa sistem pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar – dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

b. Definisi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi – transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak, akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang penting yaitu:

- 1) Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan.
- 2) Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya.
- 3) Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan dimasa yang akan datang.
- 4) Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang.

Masih banyak perusahaan atau individu yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena tidak mengerti sifat – sifat dari perpajakan. Berikut adalah sifat – sifat perpajakan:

- 1) Pajak bersifat wajib atau dipaksakan, merupakan iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah dengan ketentuan tertentu.
- 2) Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembelanjaan pemerintah dalam membangun negara misalnya pembangunan infrastruktur, bantuan sosial dan lainnya.
- 3) Kewajiban masyarakat yang memenuhi syarat untuk membayar pajak adalah membayar pajak sebelum jatuh tempo kepada pemerintah sesuai dengan perhitungan akuntansi perpajakan.

- 4) Fungsi pajak tidak hanya untuk mengatur aspek ekonomi pada suatu negara, tetapi juga termasuk aspek sosial dan budaya.

c. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Hery (2013) menyatakan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.”

Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaiannya tepat waktu, akurat dan objektif. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dari laporan ini terbaca bagaimana kondisi perusahaan yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

Laporan keuangan juga memiliki karakteristik kualitatif yang merupakan cirri khas didalamnya dapat lebih bermanfaat bagi tiap

pemakainya dalam mengambil keputusan. Waluyo (2008) menyebutkan terdapat empat karakteristik, yaitu:

1) Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis secara jelas.

2) Relevan

Informasi harus relevan agar memenuhi kebutuhan pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

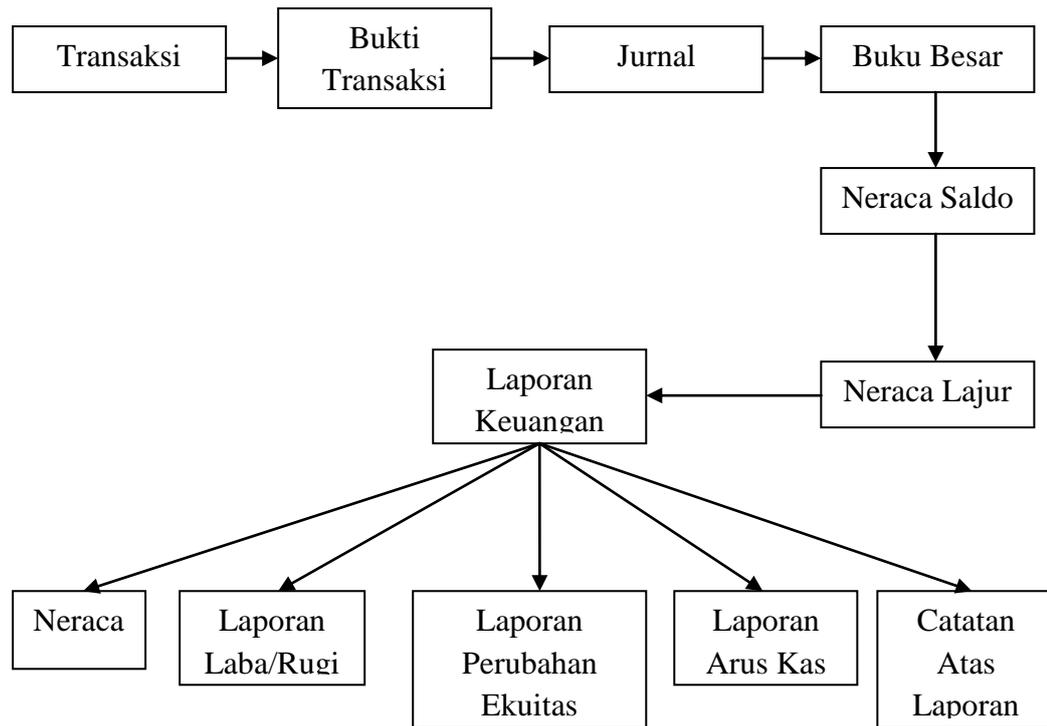
3) Materialitas

Menetapkan materialitas bergantung pada pos ataupun kesalahan yang dinilai sehingga materialitas merupakan ambang batas agar informasi mempunyai manfaat.

4) Keandalan

Informasi harus andal (reliable), artinya berkualitas dan tidak menyesatkan.

Laporan keuangan yang telah selesai dibuat akuntan pada umumnya selalu berpedoman pada siklus akuntansi sebagai sebuah tahapan – tahapan yang harus diikuti oleh akuntan dalam menyelesaikan laporan keuangan adapun bentuk siklus akuntansi mulai dari awal sampai akhir ditunjukkan seperti gambar berikut.



Sumber: Lubis, Arfan Ikhsan, dkk (2017). *Teori Akuntansi*

Gambar II.1 Siklus Akuntansi

2. Konsep Dasar Perpajakan

a. Definisi Pajak

Definisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak, anatar lain:

Menurut Sumarsan (2013), definisi yang diberikan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro menyatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adapun definisi yang diberikan oleh P.J.A Andriani adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Faisal, 2009)

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur, antara lain:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksa.
- 2) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- 5) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan – pembiayaan Negara.

Dalam pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan maka dari itu menurut Mardiasmo (2011) syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah:

- a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan Undang – Undang dan pelaksanaan

pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang – Undang Perpajakan yang baru.

b. Penggolongan Pajak

Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

- 1) Menurut golongannya, yaitu:
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut sifatnya, yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib

Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Fungsi, Syarat dan Sistem Pemungutan Pajak

1) Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut Resmi (2009), ada dua fungsi pajak yaitu:

a) Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya.

b) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

(1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah. PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin

tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengeanaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- (2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- (4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, rokok, baja dan lainnya : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- (5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi : dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

(6) Pemberlakuan *tax holiday* :dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2) Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang (Syarat Yuridis).
- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) juga menyebutkan, “Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut:

1) Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang ditaur oleh Undang – Undang.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.”

e. Manajemen Pajak

Pajak sangat penting diketahui oleh seluruh pihak, tetapi tidak mudah untuk mempelajarinya. Pada umumnya, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dapat melakukan manajemen pajak sebagai upaya dalam penghematan pajak secara legal dan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Berikut definisi manajemen pajak menurut Suandy (2011):

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan liquiditas yang diharapkan.”

Tujuan manajemen pajak terbagi dua, yaitu:

- 1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.
- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan liquiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak menurut Suandy (2011) dapat dicapai melalui fungsi – fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- 1) Perencanaan pajak (*tax planning*)
- 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- 3) Pengendalian pajak (*tax control*)

f. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut pasal 17 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25%. Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (miliar) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

3. Laporan Laba Rugi

a. Definisi Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi (*income statement*) adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Didalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya – biaya yang

dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Laporan laba rugi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan, apakah memperoleh laba selama menjalankan usaha atau justru merugi.

Adapun menurut Agoes dan Trisnawati (2007) menyatakan sebagai berikut:

“Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut”.

Dalam akuntansi pajak, Laporan Rugi Laba (R/L) lebih banyak disebut sebagai Laporan Laba Rugi dengan harapan Wajib Pajak lebih terbiasa dengan perkataan laba dibanding rugi. Berkaitan dengan istilah laba, dikenal dua pengertian yang seharusnya tidak dibedakan. Kedua istilah itu adalah laba komersial dan laba fiskal.

1) Laba Komersial

Laba komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2) Laba Fiskal

Laba fiskal untuk wajib pajak badan identik dengan laba kena pajak, tetapi untuk wajib pajak perseorangan, dari laba fiskal

untuk menjadi laba kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Fungsi dan Tujuan Laporan Laba Rugi

Penyusunan laporan laba rugi tentunya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu entitas bisnis.
- 2) Untuk memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan, apakah memperoleh laba atau merugi pada setiap periode akuntansi.
- 3) Menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen perusahaan untuk menentukan berbagai langkah yang harus diambil di periode berikutnya.
- 4) Menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besaran biaya perusahaan.
- 5) Membantu proses analisis usaha sehingga dapat mengukur perkembangan suatu entitas bisnis.
- 6) Menjadi acuan perusahaan dalam upaya pengembangan bisnis bila ingin meningkatkan perolehan laba.
- 7) Membantu proses analisis strategi perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah diterapkan sebelumnya dalam mencapai peningkatan perusahaan.

- 8) Menjadi cerminan profil suatu entitas bisnis bagi calon investor maupun kreditur yang akan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan tersebut.

c. Elemen Dalam Laporan Laba Rugi

Dalam penyusunan laba rugi terdapat empat elemen penting.

Adapun elemen – elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan (*revenue*), yaitu pemasukan atau penambahan aktiva lainnya dari suatu entitas bisnis.
- 2) Kewajiban (*expense*), yaitu pengeluaran atau penggunaan aktiva dari suatu perusahaan.
- 3) Keuntungan (*profit*), yaitu penambah ekuitas karena terjadinya transaksi periferal perusahaan atau investasi dari pemilik perusahaan.
- 4) Kerugian (*loss*), yaitu penurunan ekuitas karena terjadinya transaksi periferal perusahaan.

4. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

a. Definisi Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan bisnis dan ekonomi khususnya

informasi tentang prospek atau arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambil keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

b. Definisi Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang – Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal – hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal – hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan keuangan fiskal dan ikhtisar kewajiban pajak.

Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

c. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

1) Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2008) persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a) Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b) Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2) Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan – tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak akan tetapi lebih

cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan.

Standar Akuntansi Keuangan (komersial) dan Undang – Undang Perpajakan sering memberikan spesifik yang berbeda, aturan mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama.

Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan. Contoh materi laporan pajak yang berbeda dihasilkan oleh perbedaan yang jelas di dalam aturan – aturan penyusutan, opsi saham dan konsolidasi.

Tabel II.1
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi Komersil	Akuntansi Fiskal
<u>Masa Manfaat:</u> a. Masa manfaat ditentukan asset berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun unsure teknis. b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan <u>Harga Perolehan:</u> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya. b. Untuk pertukaran aset tidak sejenis menggunakan harga wajar. c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aset	<u>Masa Manfaat:</u> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. b. Nilai residu tidak diperhitungkan. <u>Harga Perolehan:</u> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan khusus berdasarkan harga yang sesungguhnya. b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan khusus berdasarkan harga pasar.

<p>yang dilepas.</p> <p>d. Aset sumbangan berdasarkan harga pasar.</p> <p><u>Metode Penyusutan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Garis lurus Jumlah angka tahun Saldo menurun/menurun ganda Metode jam jasa Unit produksi Anuitas Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p><u>Sistem Penyusutan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan individual Penyusutan gabungan/kelompok <p><u>Saat Dimulainya Penyusutan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Saat penyelesaian 	<p>c. Untuk transaksi tukar – menukar adalah berdasarkan harga pasar.</p> <p>d. Dalam rangka likuiditas, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.</p> <p>e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi</p> <p><u>Metode Penyusutan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk aset tetap bangunan adalah garis lurus. Untuk aset tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas. <p><u>Sistem Penyusutan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan. <p><u>Saat Dimulainya Penyusutan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Saat perolehan Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.
---	---

Sumber: Data diolah

5. Koreksi Fiskal

a. Definisi Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal atau yang biasa disebut rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Menurut Setiawan dan Musri (2006) menyatakan, “rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan”. Adapun tujuan dilakukannya koreksi fiskal yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak, serta agar tidak adanya perbedaan pengakuan pendapatan/biaya antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Dengan dilakukannya proses koreksi fiskal ini, maka wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus, karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan laba rugi. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur – unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran tersebut

dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Solusi antara penerapan SAK dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan adalah dengan melakukan suatu rekonsiliasi.

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan SAK dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas dua macam, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Menurut Zain (2008), menyatakan bahwa:

“Menyusun rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, urutan penyusunannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Buat terlebih dahulu daftar penyusunan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- 2) Penyusutan fiskal tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan pengalokasian yang dilakukan oleh perusahaan.
- 3) Susun rekonsiliasi harga pokok produksi.
- 4) Susun rekonsiliasi biaya operasional.
- 5) Susun rekonsiliasi pendapatan/beban lain – lain.
- 6) Rekonsiliasi laba rugi, yang dihimpun dari jumlah akhir masing – masing rekonsiliasi sebelumnya.”

Zain juga menyatakan bahwa banyaknya rekonsiliasi yang harus disusun disesuaikan dengan tipe perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

1) Beda Tetap (Permanen)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Muljono dan Wicaksono (2009):

“Beda tetap terjadi apabila transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, tetapi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.”

Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah – istilah berikut:

- a) Penghasilan sebagai objek pajak
- b) Penghasilan bukan sebagai objek pajak
- c) Penghasilan terkena PPh final
- d) Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun – tahun berikutnya. Beda tetap dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu beda tetap positif dan beda tetap negatif.

Beda tetap positif terjadi apabila terdapat laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan. Sementara beda tetap negatif terjadi apabila terdapat pengeluaran sebagai beban laba komersial yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan.

2) Beda Waktu (Sementara)

Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Definisi beda waktu menurut Anastasia (2010) sebagai berikut :

“Beda sementara adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk satu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.”

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu, akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan serta kompensasi kerugian fiskal. Menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan waktu dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban menurut SAK lebih lambat dari pengakuan beban menurut ketentuan perpajakan, Suandy (2008).

b. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

1) Koreksi Fiskal Positif

Menurut Anastasia (2010), “Koreksi fiskal positif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan

dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.” Koreksi fiskal positif mengakibatkan pengukuran biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Adapun menurut Agoes (2007) yaitu:

“Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a) Beban yang tidak diakui oleh pajak.
- b) Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
- c) Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
- d) Penyesuaian fiskal positif lainnya.”

2) Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Anastasia (2010): “Koreksi fiskal negatif adalah koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.” Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan. Adapun menurut Agoes (2007) yaitu:

“Koreksi fiskal negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi fiskal negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh final.
- c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.

- d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.”

c. Contoh Kasus Koreksi Fiskal

Contoh kasus berikut penulis ambil dari Buku Praktikum Perpajakan, Edisi 3 Oleh Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2017).

Tabel II.2
Laporan Laba Rugi PT. ABC

PT. ABC	
Laporan Laba Rugi	
Periode 1 Jan - 31 Des 2016	
Penjualan Bruto	Rp. 9.500.000.000
HPP	Rp. (7.800.000.000)
Laba Bruto Usaha	Rp 1.700.000.000
Biaya Usaha:	
Gaji, Bonus, THR dan Pesangon	Rp. 20.000.000
PPH Pasal 21	Rp. 6.000.000
Biaya Pengangkutan	Rp. 40.000.000
Biaya Pemasaran	Rp. 20.000.000
Biaya Member Golf	Rp. 30.000.000
Biaya Pelatihan Pegawai	Rp. 70.000.000
Biaya Jasa Pemeliharaan	Rp. 80.000.000
Sewa Gedung Kantor	Rp. 60.000.000
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 50.000.000
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Rp. 45.000.000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 35.000.000
Biaya Jamuan Tamu	Rp. 54.000.000
Biaya Listrik, Air, dan Telepon	Rp. 35.000.000
Sumbangan HUT RI	Rp. 10.000.000
Biaya Alat Kantor	Rp. 75.000.000
Biaya Pakaian Seragam Satpam dan Keselamatan Kerja	Rp. 60.000.000
PKB, PBB, Bea Materai	Rp. 30.000.000
Biaya Makan Minum Karyawan	Rp. 20.000.000
Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 20.000.000
Premi Asuransi Kebakaran	Rp. 25.000.000
Premi Asuransi Jiwa	Rp. 15.000.000
Premi Asuransi Kesehatan	Rp. 20.000.000
Biaya Pengobatan Rumah Sakit	Rp. 30.000.000
Bantuan Untuk Masyarakat Sekitar	Rp. 40.000.000
Biaya Rekreasi	Rp. 50.000.000
Total Biaya Usaha	Rp. (1.040.000.000)
Biaya Diluar Usaha:	

Biaya Perawatan Gudang Yang Disewakan	Rp. 20.000.000	
Biaya Pengurusan Tanah Yang Dijual	Rp. 35.000.000	
Rugi Selisih Kurs	Rp. 15.000.000	
Total Biaya Luar Usaha		Rp. (70.000.000)
Pendapatan Lain - lain:		
Sewa Gudang	Rp. 90.000.000	
Penjualan Tanah	Rp. 80.000.000	
Sewa Mesin	Rp. 40.000.000	
Bunga Deposito dari Bank	Rp. 25.000.000	.
Dividen	Rp. 50.000.000	
Total Pendapatan Lain - lain		Rp. 285.000.000
Laba Neto Usaha Tahun 2016		Rp. 875.000.000

Keterangan Tambahan:

- 1) Penghapusan piutang karena tidak ditemukan lagi orangnya dan alamatnya sudah pindah.
- 2) Biaya pengobatan dibayarkan kepada klinik yang punya kerjasama dengan perusahaan.
- 3) Dividen diterima dari PT. XYZ dimana PT. ABC adalah pemegang saham sebanyak 40%.
- 4) Harga Pokok Penjualan:

Persediaan barang dagangan 1 Jan 2016	Rp. 1.500.000.000
Pembelian barang dagangan	Rp. 9.000.000.000
Persediaan barang dagangan 31 Des 2016	<u>Rp. 2.700.000.000</u>
HPP	Rp. 7.800.000.000
- 5) Aktiva tetap per 1 Jan 2016 dan penyusutan metode garis lurus

Tabel II.3
Penyusutan Metode Garis Lurus

Jenis Aktiva Tetap	Thn Perolehan	Harga Perolehan
Kelompok 1	12-12-2012	48.000.000
Kelompok 2	05-07-2009	100.000.000

Kelompok 3	19-06-2013	200.000.000
Bangunan Permanen	05-09-2008	1.000.000.000

6) Pajak – pajak tahun 2016:

- a) PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawan sebesar Rp. 6.000.000.
- b) PPh Pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah sebesar Rp. 25.000.000.
- c) PPh Pasal 23 yang dipungut pihak lain sebesar Rp. 600.000.
- d) PPh Pasal 25 sebesar Rp. 18.000.000.
- e) PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 6.000.000 atas pembayaran sewa gedung.
- f) PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 9.000.000 atas pembayaran sewa gedung.

Pemecahan Masalah:

Tabel II.4
Rekonsiliasi Fiskal

Laporan Laba Rugi Tahun 2016	
Rekonsiliasi Fiskal	
Laba neto usaha tahun 2016	Rp. 875.000.000
Ditambah koreksi positif fiskal:	
PPh Pasal 21	Rp. 6.000.000
Biaya member golf	Rp. 30.000.000
Penghapusan piutang tak tertagih	Rp. 45.000.000
Sumbangan HUT RI	Rp. 10.000.000
Biaya pengobatan rumah sakit	Rp. 30.000.000
Bantuan untuk masyarakat sekitar	Rp. 40.000.000
Biaya rekreasi	Rp. 50.000.000
Biaya perawatan gudang yang disewakan	Rp. 20.000.000
Biaya pengurusan tanah yang dijual	<u>Rp. 35.000.000</u>
Jumlah	Rp. 266.000.000

Dikurangi koreksi negatif fiskal:	
Penyusutan aktiva tetap	Rp. 66.000.000
Pendapatan sewa gudang	Rp. 90.000.000
Laba penjualan tanah	Rp. 80.000.000
Bunga deposito dari Bank	Rp. 25.000.000
Dividen	<u>Rp. 50.000.000</u>
Jumlah	<u>Rp. 311.000.000</u>
Jumlah laba neto fiskal	Rp. 830.000.000

PPh yang terutang tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Jumlah bruto penghasilan usaha sebesar Rp. 9.500.000.000 ditambah penghasilan lain (final) dan bukan obyek PPh sebesar Rp. 285.000.000 masih dibawah Rp. 50.000.000.000 sehingga WP berhak mendapat fasilitas pengurangan pajak sebesar 50% namun terbatas atas penghasilan kena pajak bagian dari 4,8M.
- 2) Penghasilan kena pajak atas peredaran usaha sebesar 4,8M adalah $(4,8M : 9,5M) \times Rp. 830.000.000 = Rp. 419.368.370$.
PPh terutang: $25\% \times 50\% \times Rp. 419.368.370 = Rp. 52.421.046$.
- 3) Sisa penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan 50% adalah $Rp. 830.000.000 - Rp. 419.368.370 = Rp. 410.631.630$. Dan PPh terutang: $25\% \times Rp. 410.631.630.000 = Rp. 102.675.900$.
- 4) Total PPh terutang sebesar $Rp. 52.421.046 + Rp. 102.675.900 = Rp. 155.096.946$.
- 5)

Tabel II.5
Pengkreditan Pajak

PPh badan yang terhutang		Rp. 155.096.946
Kredit Pajak:		
PPh Pasal 22 sebesar	Rp. 25.000.000	
PPh Pasal 23 sebesar	Rp. 600.000	
PPh Pasal 25 sebesar	<u>Rp. 18.000.000</u>	<u>Rp. 43.600.000</u>
Total Kredit Pajak		Rp. 111.496.946
PPh badan yang kurang dibayar (Pasal 29) tahun 2016		

PPh Pasal 25 setelah SPT tahun 2016 dimasukkan adalah (Rp. 155.096.946 – PPh yang dipotong (Rp. 25.000.000 + Rp. 600.000)) : 12bulan = Rp. 10.791.412 per bulan.

Catatan:

- 1) PPh Pasal 21 Rp. 6.000.000 bukan kredit pajak karena merupakan pajak karyawan yang dipotong oleh PT. ABC.
- 2) PPh Pasal 4 ayat (2) Rp. 6.000.000 atas pembayaran sewa gedung bukan kredit pajak karena milik penerima sewa yang dipotong oleh PT. ABC.
- 3) PPh Pasal 4 ayat (2) Rp. 9.000.000 atas penerimaan sewa gudang bukan merupakan kredit pajak meskipun beban PPh PT. ABC karena PPh tersebut bersifat final.

Tabel II.6
Rekapitulasi Rekonsiliasi Fiskal

Pos Rekening	Lap. Keuangan Komersial	Koreksi +	Koreksi -	Lap. Keuangan Fiskal
1. Penjualan	9.500.000.000	-	-	9.500.000.000
2. HPP	7.800.000.000	-	-	7.800.000.000
3. Laba Bruto	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000
4. Biaya Usaha:		-	-	
Gaji, bonus, thr dan pesangon	120.000.000	-	-	120.000.000
PPh Pasal 21	6.000.000	6.000.000	-	0
Biaya Pengangkutan	40.000.000	-	-	40.000.000
Biaya Pemasaran	20.000.000	-	-	20.000.000
Biaya Member Golf	30.000.000	30.000.000	-	0
Biaya Pelatihan Pegawai	70.000.000	-	-	70.000.000
Biaya Jasa Pemeliharaan	80.000.000	-	-	80.000.000
Sewa Gedung Kantor	60.000.000	-	-	60.000.000
Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor	50.000.000	-	-	50.000.000
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	45.000.000	45.000.000		0
Biaya Perjalanan Dinas	35.000.000	-	-	35.000.000
Biaya Jamuan Tamu	54.000.000	-	-	54.000.000
Biaya Listrik, Air dan Telepon	35.000.000	-	-	35.000.000
Sumbangan HUT RI	10.000.000	10.000.000	-	0
Biaya Alat Kantor	75.000.000	-	-	75.000.000
Biaya Pakaian Seragam Satpam dan Keselamatan Kerja	60.000.000	-	-	60.000.000
PKB, PBB, Bea Materai	30.000.000	-	-	30.000.000
Biaya Makan Minum Karyawan	20.000.000	-	-	20.000.000
Penyusutan Aktiva Tetap	20.000.000	-	66.000.000	86.000.000
Premi Asuransi Kebakaran	25.000.000	-	-	25.000.000
Premi Asuransi Jiwa	15.000.000	-	-	15.000.000
Premi Asuransi Kesehatan	20.000.000	-	-	20.000.000
Biaya Pengobatan Rumah Sakit	30.000.000	30.000.000	-	0
Bantuan Untuk Masyarakat Sekitar	40.000.000	40.000.000	-	0

Biaya Rekreasi	50.000.000	50.000.000	-	0
5. Biaya Diluar Usaha				
Biaya Perawatan Gedung Disewakan	20.000.000	20.000.000	-	0
Biaya Pengurusan Tanah Dijual	35.000.000	35.000.000	-	0
Rugi Selisih Kurs	15.000.000	-	-	15.000.000
6. Pendapatan Luar Usaha				
Sewa Gudang	90.000.000	-	90.000.000	0
Laba Penjualan Tanah	80.000.000	-	80.000.000	0
Sewa Mesin	40.000.000	-	-	40.000.000
Bunga Deposito Bank	25.000.000	-	25.000.000	0
Dividen	50.000.000	-	50.000.000	0
Laba Neto Usaha	875.000.000	266.000.000	311.000.000	830.000.000

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan koreksi fiskal dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.7
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Asep Safaat Hidayat (2013)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH)	Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Indomix Perkasa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan? Berapa jumlah	Metode Deskriptif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya – biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.

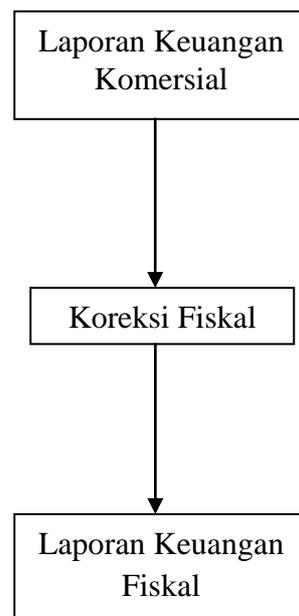
Ahmad Faizin Nasution (2016)	Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan	<p>penghasilan kena pajak pada PT. Indomix Perkasa yang sebagai dasar penentuan pajak terhutang tahun pajak 2010?</p> <p>Apa penyebab perbedaan antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal? Seberapa besar selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal?</p>	Metode Deskriptif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya – biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Biaya – biaya dan penghasilan yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan, imbalan biaya paska kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, biaya berlangganan, data komunikasi, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan beban perjalanan dinas, representasi?hiburan , iklan dan
------------------------------	--	--	-------------------	--

				pendapatan jasa giro. Selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal yaitu menurut laba rugi komersial sebesar Rp. 12.787.953.895, sedangkan fiskal sebesar Rp. 11.364.319.179, sehingga kenaikannya sebesar Rp. 1.423.634.716 atau 11% sesuai UU PPh.
Ayu Dwijayanti (2013)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar	Item – item apa sajakah yang dapat dikoreksi dari PT. Citra Sulawesi Sejahtera berdasarkan laporan keuangan komersil yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?	Metode Deskriptif	Terdapat beberapa biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi, sehingga menimbulkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 106.958.652 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 13.276.450. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 3.759.497,43

B. Kerangka Berfikir

Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang menghasilkan laba komersial disusun berdasarkan standar – standar yang telah ditetapkan sesuai prinsip akuntansi. Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan standar ini terutama dimaksudkan agar kualitas laporan keuangan bisa dipertanggung jawabkan. Secara ringkas, kerangka pemikiran dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar II.2 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2006), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain”.

Data kualitatif adalah data yang dihimpun berdasarkan cara – cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan dan penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.

B. Devinisi Operasional Variabel

1. Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a. Beban menurut Akuntansi

Beban adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi.

b. Beban menurut Perpajakan

Beban adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

2. Koreksi Fiskal

Koreksi Fiskal adalah penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

3. Beda Tetap dan Beda Waktu

a. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan yang dalam menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari.

b. Beda Waktu

Beda Waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Cakra Buana Alkesindo, yang bergerak di bidang penjualan produk alat – alat kesehatan dan kepemilikan

alat kesehatan. Berlokasi di Jln. Bromo Komp. Bromo Bisnis Center No. 28, Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

Keterangan	Desember	Januari	Februari	Maret
PraRiset	■			
Penyusunan Proposal		■		
Seminar Proposal			■	
Pengumpulan Data			■	
Pengolahan Data				■
Penyusunan Skripsi				■
Sidang Skripsi				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan, yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan pajak yang berlaku.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berupa laporan keuangan yaitu, neraca, laporan laba rugi dan SPT PT. Cakra Buana Alkesindo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode dokumentasi dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data – data yang ada.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu:

1. Wawancara.

Penulis melakukan wawancara langsung dengan staff (yang bersangkutan) PT. Cakra Buana Alkesindo mengenai profil perusahaan, susunan organisasi perusahaan, lingkup kerja perusahaan dan mengenai laporan keuangan perusahaan tahun 2017 pada PT. Cakra Buana Alkesindo. Berikut adalah beberapa isi wawancara:

- a. Apakah perusahaan sudah melakukan koreksi fiskal sebelum melakukan pelaporan pajak?
- b. Apakah perusahaan termasuk Wajib Pajak Badan yang patuh pajak?
- c. Apa saja yang termasuk dalam biaya Entertaint?
- d. Apa yang dimaksud dan digunakan sebagai apa Biaya CN didalam perusahaan?

- e. Apakah perusahaan menyalurkan Biaya Infak kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh Pemerintah?
- f. Berapa jumlah THR yang dibebankan?
- g. Apa saja yang termasuk didalam Biaya Lain – lain?
- h. Apa saja yang termasuk didalam Biaya Rutin?
- i. Apa yang dimaksud dan digunakan sebagai apa Biaya Fee didalam perusahaan?
- j. Apa saja yang termasuk didalam Pendapatan Lain - lain?
- k. Apa saja yang termasuk didalam Biaya Diluar Usaha?

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan memperoleh data sekunder melalui buku, internet, pencatatan dan pengopian atas data – data atau dokumen dan referensi yang terkait dengan judul penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi kasus. Analisis deskriptif merupakan analisis yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi tiap – tiap akun laporan keuangan khususnya laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan dan beban lain – lain berdasarkan data yang sudah dikumpulkan penulis dari perusahaan.
2. Melihat kesesuaian tiap – tiap akun laporan laba rugi dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan koreksi fiskal dan menentukan besarnya koreksi jika ternyata dilakukan koreksi fiskal.
3. Mengambil kesimpulan.

**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan PT. Cakra Buana Alkesindo

PT. Cakra Buana Alkesindo merupakan Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik, manajemen, karyawan dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya Neraca dan Laba Rugi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel IV.1
Neraca PT. Cakra Buana Alkesindo**

PT. CAKRA BUANA ALKESINDO			
NERACA			
periode 01 Jan - 31 Des 2017			
Aktiva	Pasiva		
Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar (Hutang)		
Kas	13.672.143	Hutang Dagang	169.605.261
Piutang Dagang	566.282.241	Hutang Lancar Lainnya	421.726.286
Persediaan Akhir	87.645.083	Jumlah Kewajiban Lancar (Hutang)	591.331.547
Jumlah Aktiva Lancar	667.599.467		
Aktiva Tetap	Modal & Laba		
Aktiva Tetap	54.250.000	Modal	50.000.000
Akm. Penyusutan	4.882.500	Laba Tahun Ini	75.635.420
Jumlah Aktiva Tetap	49.367.500	Jumlah Modal & Laba	125.635.420
Total Aktiva	716.966.967	Total Pasiva	716.966.967

Sumber: PT. Cakra Buana Alkesindo

Tabel IV.2
Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo

PT. CAKRA BUANA ALKESINDO	
LABA RUGI	
periode 01 Jan - 31 Des 2017	
Pendapatan	2.159.682.050
Persediaan Awal	10.500.000
Pembelian	1.552.141.419
Persediaan Akhir	87.645.083
Harga Pokok Penjualan	1.474.996.336
Laba Kotor	684.685.714
Beban:	
Beban Pemasaran:	
By. Entertaint	40.025.347
By. CN	177.741.400
By. Infak	3.020.393
Total Beban Pemasaran	220.787.140
Beban Operasional:	
By. Gaji + nTHR	168.900.000
By. Kendaraan	4.918.500
By. Perdin	37.615.000
By. ATK	5.693.990
By. Listrik, PAM & Telkom	9.535.000
By. Perlengkapan Kantor	680.000
By. Lain - lain	8.186.000
By. Umum & Admin	1.948.750
By. Ongkir	15.668.800
By. Rutin	97.721.000
By. Fee	35.000.000
Total Beban Operasional	385.867.040
Pendapatan Lain - lain	102.876
By. Diluar Usaha	2.498.990
Laba Bersih	75.635.420

Sumber: PT. Cakra Buana Alkesindo

2. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi

Rekonsiliasi merupakan usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (disusun berdasarkan SAK) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan).

Tabel IV.3
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo

PT. Cakra Buana Alkesindo					
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi					
Yang Berakhir 31 Desember 2017					
Pos Rekening	Lap. Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal		Lap. Keuanagan Fiskal	Ket.
		Positif	Negatif		
Pendapatan	2.159.682.050			2.411.827.672	
Persediaan Awal	10.500.000			10.500.000	
Pembelian	1.552.141.419			1.552.141.419	
Persediaan Akhir	(87.645.083)			(87.645.083)	
Harga Pokok Penjualan	(1.474.996.336)			(1.474.996.336)	
Laba Kotor	684.685.714			936.831.336	
Beban:					
Beban Pemasaran:					
Biaya Entertaint	40.025.347			40.025.347	6(1)a
Biaya CN	177.741.400	177.741.400		0	9(1)b
Biaya Infak	3.020.393	3.020.393		0	9(1)g
Total Beban Pemasaran	220.787.140			40.025.347	
Beban Operasional:					
Biaya Gaji + nTHR	168.900.000	48.900.000		120.000.000	9(1)e
Biaya Kendaraan	4.918.500			4.918.500	6(1)a
Biaya Perdin	37.615.000			37.615.000	6(1)a
Biaya ATK	5.693.990			5.693.990	6(1)a
Biaya Listrik, PAM & Telkom	9.535.000			9.535.000	6(1)a
Biaya Perlengkapan Kantor	680.000			680.000	6(1)a
Biaya Lain - lain	8.186.000			8.186.000	6(1)i
Biaya Umum & Admin	1.948.750			1.948.750	6(1)a
Biaya Ongkir	15.668.800			15.668.800	6(1)a

Biaya Rutin	97.721.000			97.721.000	6(1)a
Biaya Fee	35.000.000	35.000.000		0	9(1)b
Total Beban Operasional	385.867.040			301.967.040	
Pendapatan Lain - lain	102.876		102.876	0	4(2)a
Biaya Diluar Usaha	2.498.990	2.498.990		0	9(1)k
Laba Bersih	75.429.668	267.160.783	102.876	594.838.949	

Sumber: Data Diolah

Dari analisis penulis, seharusnya perusahaan membuat Laporan Laba Rugi seperti yang sudah penulis buat dalam tabel berikut:

Tabel IV.4
Laporan Laba Rugi PT. Cakra Buana Alkesindo

PT. CAKRA BUANA ALKESINDO	
LABA RUGI	
periode 01 Jan - 31 Des 2017	
Pendapatan	2.159.682.050
Persediaan Awal	10.500.000
Pembelian	1.552.141.419
Persediaan Akhir	87.645.083
Harga Pokok Penjualan	1.474.996.336
Laba Kotor	684.685.714
Beban:	
Beban Pemasaran:	
Biaya Promosi	40.025.347
Biaya Entertaint	212.741.400
Infak	3.020.393
Total Beban Pemasaran	255.787.140
Beban Operasional:	
Biaya Gaji + nTHR	168.900.000
Biaya Kendaraan	4.918.500
Biaya Perjalanan Dinas	37.615.000
Biaya ATK	5.693.990
Biaya Listrik, PAM & Telkom	9.535.000
Biaya Perlengkapan Kantor	680.000
Biaya Sumbangan	8.186.000
Biaya Umum & Admin	1.948.750
Biaya Pengiriman	15.668.800
Biaya Makan & Minum	97.721.000
Total Beban Operasional	385.867.040

Pendapatan Diluar Usaha:	
Pendapatan Bunga	102.876
Biaya Diluar Usaha:	
Sanksi Administrasi	2.498.990
Laba Bersih	75.635.420

Sumber: Data Diolah

B. Pembahasan

1. Biaya CN

Biaya CN merupakan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan suatu tender yang dialihkan kepada badan usaha lain yang berkompoten untuk memenangkannya. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 (1) huruf b, menyatakan bahwa “biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota” tidak boleh dikurangkan.

2. Infak

Infak merupakan biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk menyumbang kepada masjid yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 (1) huruf g, menyatakan bahwa “harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah” tidak boleh dikurangkan.

3. Biaya Gaji + nTHR

Biaya Gaji + nTHR merupakan biaya yang digabungkan oleh perusahaan. Biaya Gaji berjumlah Rp. 120.000.000 dan THR berjumlah Rp. 48.900.000 (berupa beras, gula dan lainnya). Berdasarkan UU PPh Pasal 9 (1) huruf e, menyatakan bahwa “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” tidak boleh dikurangkan.

4. Biaya Fee

Biaya Fee merupakan biaya yang digunakan perusahaan dalam mengurus surat – surat penting dimana perusahaan menggunakan jasa pihak lain agar mudah dan cepat. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 (1) huruf b, menyatakan bahwa “biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota” tidak boleh dikurangkan.

5. Pendapatan Lain - lain

Pendapatan Lain - lain merupakan pendapatan bunga. Pendapatan ini diakui menurut laporan komersial namun telah dikenakan pajak final sehingga tidak termasuk sebagai objek pajak PPh Badan. Maka pendapatan

bunga sebesar Rp. 102.876 harus dikoreksi negatif seluruhnya. Hal ini berdasarkan UU PPh Pasal 4 (2) huruf a yang menyatakan, “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi” dapat dikenai pajak bersifat final.

6. Beban Diluar Usaha

Biaya Diluar Usaha merupakan sanksi administrasi yang digunakan perusahaan untuk membayar denda. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 (1) huruf k, menyatakan bahwa “sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan di bidang perpajakan” tidak boleh dikurangkan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menemukan beban – beban yang tidak diakui oleh UU PPh dan seharusnya perusahaan melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum melakukan pelaporan pajak. Adapun beban – beban yang dikoreksi antara lain, Biaya CN, Biaya Infak, Biaya Gaji + nTHR, Biaya Rutn, Biaya Fee, Pendapatan Lain – lain dan Biaya Diluar Usaha.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang penulis lakukan terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. Cakra Buana Alkesindo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya – biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.
2. Perbedaan yang ada pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT. Cakra Buana Alkesindo tahun 2017 terdapat pada pos – pos berikut ini:
 - a. Biaya CN
 - b. Biaya Infak
 - c. Biaya Gaji + nTHR
 - d. Biaya Fee
 - e. Pendapatan Lain – lain
 - f. Biaya Diluar Usaha
3. Jumlah laba bersih pada laporan laba rugi yang dibuat perusahaan dengan analisa penulis terdapat perbedaan, yaitu menurut perusahaan sebesar Rp. 75.635.420 sedangkan menurut hasil yang penulis analisa sebesar Rp. 75.429.668.

4. Jumlah pendapatan pada laporan laba rugi dengan jumlah pendapatan pada rekap data penjualan yang dibuat perusahaan tahun 2017 terdapat perbedaan, yaitu sebesar Rp. 2.159.682.050 pada laporan laba rugi sedangkan pada rekap data penjualan tahun 2017 sebesar Rp. 2.411.827.672.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis lakukan, penulis menyarankan agar perusahaan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum melaporkan pajaknya dan memperhatikan ketentuan perpajakan dan prosedur pencatatan baik yang terdapat dalam UU PPh maupun Keputusan Dirjen Pajak mengenai biaya – biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.

2. Bagi Pihak Lain

Penulis menyarankan sebaiknya memperhatikan ketersediaan akses data. Karena data yang digunakan umumnya bersifat rahasia dan tidak ditujukan untuk khalayak ramai, khususnya pada perusahaan tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita (2007). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anastasia, Diana dan Lilis S (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis Edisi 3*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dwijayanti, Ayu (2013). “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Semarang”. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS%20KOREKSI%20FISKAL.pdf>. Diakses 19 Desember 2018.
- Faisal, Gatot (2009). *How To Be A Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak Yang Lebih Cerdas*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hery (2013). *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hidayat, Asep Safaat (2013). “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang (Studi Kasus Pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)”. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/23886/1/Skripsi%20Full.pdf>. Diakses 20 Desember 2018.
- Lubis, Arfan Ikhsan, dkk (2017). *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Lutfi Kurniawan (2017). “Pengertian Koreksi Fiskal dan Jenisnya”. <http://sumberinformasiinterpelajar.blogspot.com/2017/08/pengertian-koreksi-fiskal-danjenisnya.html>. Diakses 19 Desember 2018.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muljono, Djoko dan Wicaksono, Baruni (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasution, Ahmad Faizin (2016). “Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terhutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan”. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8434/1/138330142.pdf>. Diakses 20 Desember 2018.
- Pohan, Chairil Anwar (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rismawani, Tety Aprilla (2016). “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel IBIS Semarang)”. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Vol. 5 No. 1, 2016.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri (2006). *Perpajakan Umum. Edisi Revisi, Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2006). *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Sembilan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas (2013). *Perpajakan Indonesia: Edisi 3, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang – Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*.
- Waluyo (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2017). *Praktikum Perpajakan, Edisi 3*. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
- Zain, Mohammad (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Fadillah Ayu Ningrum
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 18 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Gaharu Blok A No. 7 Medan

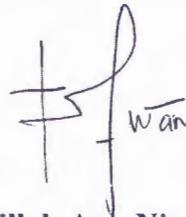
Nama Orang Tua

Nama Ayah : Subagio
Nama Ibu : Yety Indrawaty

Pendidikan Formal :

1. TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Medan Tahun 2002-2003
2. SD Swasta YP Medan Putri Medan Tahun 2003-2009
3. SMP Negeri 37 Medan Tahun 2009-2012
4. SMA Negeri 18 Medan Tahun 2012-2015
5. Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2015 sampai sekarang.

Medan, Maret 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and the name 'Fadillah Ayu Ningrum' written in a cursive script.

Fadillah Ayu Ningrum



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 01 Februari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi yang berisikan sebagai berikut :

Nama : FADILLAH AYU NINGRUM
N.P.M. : 1505170135
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 18 NOVEMBER 1997
Alamat Rumah : JL.GAHARU KOMP PTPN II NO.7A
Judul Proposal : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT.CAKRA BUANA ALKESINDO

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
	- latar belakang masalah di perbaiki - Dukung - benar
	- kerangka kerja
	perbaiki penulisan
an *	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 01 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, AK, MM

Pemanding

SUKMA LESMANA, SE, M.Si



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 01 Februari 2019 menerangkan bahwa:

- Nama : FADILLAH AYU NINGRUM
- N .P.M. : 1505170135
- Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN,18 NOVEMBER 1997
- Alamat Rumah : JL.GAHARU KOMP PTPN II NO.7A
- JudulProposal : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT.CAKRA BUANA ALKESINDO

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. S. H. Syamsul Bahri Arifin, Ak, MM 14/2.2019*

Medan, 01 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M. Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M. Si

Pembimbing

RS.H.SYAMSUL BAHRI ARIFIN, AK, MM

Pembanding

SUKMA LESMANA, SE, M. Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M. Si



MSU
Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : FADILLAH AYU NINGRUM
 NPM : 1505170135
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Alamat Rumah : Jl. Gaharu Blok A No. 7
 Judul Penelitian : Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Cakra Buana Alkesindo

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan	Tanda Tangan	
14/1/19	1. Judul Disiplin	[Signature]	
	2. Tujuan & manfaat penelitian disesuaikan dan buku pedoman (hal 5)		
	3. Papikan rata kiri & ketikca.		
	4. tulisan Gambar II-1 (hal 12)		
	5. setiap teori hrs ada referensi (hal 22)		
	6. perbaiki sub ³ judul		
	7. Hilangkan teori yg tak relevan.		
	8. sub ² judul yg 2 bnti buat 1 gressi (30)		
	9. rapikan ketikca sub ³ judul (34)		
	10. urutkan / deskripsikan kerangka berpikir (10m, 1 hal)		
	11. lengkapi Daftar Pustaka		
	12. Buana Draft 1 saat bimbingan berikutnya		

Medan, Januari 2019

Pembimbing

[Signature]

H. Syamsul Bahri Arifin.,SE.,Ak.,MM.,CA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

Fitriani Saragih,SE.,M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : FADILLAH AYU NINGRUM
 N.P.M : 1505170135
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Proposal : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN
 KOMERSIAL PADA PT. CAKRA BUANA ALKESINDO

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
22/1/19	- Laporan katipon resmi dicantumkan - dan DP - Hinderan kutipan lampiran - Perbaiki Daftar Pustaka	Y	
26/1/19	- Deskripsi kerangka berpikir - perbaiki penulisan daftar tabel - dan gambar - teori yg tdk relevan jangan - dituliskan	Y	
28/1/19	ace proposal	Y	

Dosen Pembimbing

YAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM, CA

Medan, Januari 2019
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



PT. Cakra Buana Alkesindo

Hospital & Laboratory equipment

Jl. Bromo, Komplek Bromo Bisnis Centre No. 28, Kota Medan

Fax: (061)735 5148, Fax: (061) 735 5148,

email: cakrabuanaalkesindo@gmail.com

Medan, 23 Februari 2019

No. : 008/SB-MR/ICBA/II/19
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Menyelesaikan Riset

KepadaYth,
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Medan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dini Fitri Anggraini
Jabatan : Komisaris

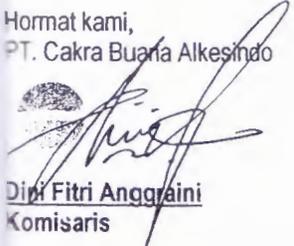
Menerangkan bahwa,

Nama : Fadilla Ayu Ningrum
NPM : 1505170135
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi

Telah selesai melakukan riset di Perusahaan kami PT. Cakra Buana Alkesindo untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata-Satu (S-1) dengan judul Skripsi " **Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cakra Buana Alkesindo** ".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Cakra Buana Alkesindo



Dini Fitri Anggraini
Komisaris



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 474/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 28/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FADILLAH AYU NINGRUM
NPM : 1505170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Penurunan tarif PPh terutang badan belum dapat meningkatkan jumlah WP terdaftar dalam memperoleh NPWP
2. Penurunan laba mengakibatkan penurunan PPN sektor dagang
3. Pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak tidak teliti sehingga mengakibatkan kesiaian yang menimbulkan restitusi PPN

Rencana Judul : 1. ANALISIS PENURUNAN TARIF PPH BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH
2. ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEKTOR DAGANG TAHUN 2016 - 2017
3. ANALISIS PROSEDUR PELAKSANAAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Objek/Lokasi Penelitian : KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(FADILLAH AYU NINGRUM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

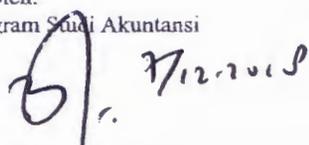
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 474/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

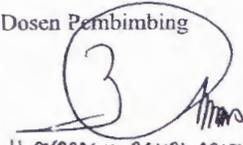
Nama Mahasiswa : FADILLAH AYU NINGRUM
NPM : 1505170135
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 28/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 2 , atau;
Alternatif judul lainnya.....
Nama Dosen pembimbing : Drs. Samsul Bahri Arifin, SE, Ak, MM, CA (Diisi dan diparaf oleh Program Studi) 28/11/2018
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KONGRESIL PADA PT. CAKRA BIJANA ALKESINDO (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing


(H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, AK, MM, CA)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : F A D I L L A H A Y U N I N G R U M

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 3 5

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N 1 8 N O V E M B E R 1 9
9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . G A H A R U B L O K A N O
7

Tempat Penelitian : P T C A K R A B U A N A A L K E S
I N D O

Alamat Penelitian : J L . B R O M O K O M P L E K B R O
M O B I S N I S C E N T E R N O .
2 8

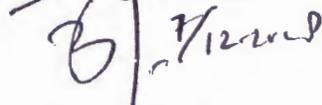
Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

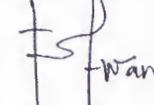
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


(FITRIANI SAPAGIH, SE, MS)

Wassalam
Pemohon


(FADILLAH AYU NINGRUM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

at ini agar disebutkan
nya

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 027/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
bersetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Bada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Fadillah Ayu Ningrum**
P M : **1505170135**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada
PT. Cakra Buana Alkesindo**

Dosen Pembimbing : **H. Syamsul Bahri Arifin., SE., Ak., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **02 Januari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Rabiul Akhir 1440 H
02 Januari 2019 M



Dekan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625044
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 9126 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 13 Rabiul Akhir 1441 H
21 Desember 2019

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Cakra Buana Alkesindo
Jln. Bromo Komp. Bromo Bisnis Center No. 28
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan ~~riset di~~ **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fadillah Ayu Ningrum
NPM : 1505170135
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



PT. Cakra Buana Alkesindo

Hospital & Laboratory equipment

Jl. Bromo, Komplek Bromo Bisnis Centre No. 28, Kota Medan

Fax. (061)735 5148, Fax: (061) 735 5148,

email: cakrabuanaalkesindo@gmail.com

Medan, 05 Januari 2019

No. : 002/SB-IR/ICBA/II/19
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Medan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dini Fitri Anggraini
Jabatan : Komisaris

Menerangkan bahwa,

Nama : Fadillah Ayu Ningrum
NPM : 1505170135
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Telah kami setuju untuk melakukan riset di Perusahaan kami PT. Cakra Buana Alkesindo guna untuk menyusun Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Demikian Surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Cakra Buana Alkesindo

Dini Fitri Anggraini
Komisaris



MSU

Cerdas | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 815 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 13 Jumadil Akhir 1440 H
18 Februari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Cakra Buana Alkesindo
Jln. Bromo Komp, Bromo Bisnis Center No. 28
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Fadillah Ayu Ningrum
N P M : 1505170135
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cakra Buana Alkesindo

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.